

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Myanmar atau yang dikenal sebagai Burma memiliki perjalanan demokrasi yang panjang dan kompleks karena adanya pembatasan kebebasan hingga banyaknya terjadi pelanggaran HAM. Junta militer Myanmar yang telah berkuasa sejak kemerdekaannya dan selalu berusaha untuk menggulingkan pemerintahan sipil serta memberikan tuduhan kemenangan sipil dalam pemilihan umum merupakan proses hasil kecurangan.¹ Dibawah pemerintahan junta militer, Myanmar mengalami banyak peningkatan dalam represi, pelanggaran HAM, dan ketidakstabilan politik. Selain itu, konflik bersenjata juga meningkat di berbagai daerah, terutama dengan kelompok etnis yang telah lama berjuang untuk otonomi.²

Pada sisi lain, banyak warga Myanmar yang menolak legitimasi junta dan berjuang untuk kembalinya pemerintahan sipil. Dalam transisinya menuju pemerintahan yang demokratis sejak kemerdekaan hingga saat ini, masyarakat sipil termasuk didalamnya gerakan akar rumput telah berusaha untuk menggalang dukungan internasional dalam memperjuangkan demokrasi. Tercatat telah terjadi periode dengan sebutan “Burmese Way to Socialism” yang berdampak pada perkembangan demokrasi di Myanmar. Pada tahun 1962 telah terjadi kudeta militer

¹ Cai, W. (2024, April 20). *What's Happening in Myanmar's Civil War?* The New York Times.

² Issett, S. (2021, February 1). *Myanmar: Timeline of a fragile democracy | Military News*. Al Jazeera

yang mana menandai dimulainya periode panjang untuk pemerintahan yang dipimpin oleh junta militer dengan beberapa kejadian pelanggaran HAM yang meluas, terjadinya banyak kerja paksa, penyiksaan hingga pembunuhan di luar hukum.³

Pemerintahan junta militer ini telah menerapkan sebuah ideologi yang berusaha untuk menciptakan negara sosialis dengan menggunakan prinsip-prinsip oleh buddha, humanisme dan marxisme.⁴ Namun, pada implementasinya berakhir dengan adanya kegagalan ekonomi dan banyak terjadinya pelanggaran HAM. Beberapa pelanggaran HAM serius telah dilakukan oleh pemerintah junta militer, termasuk banyaknya warga sipil yang telah dipaksa untuk bekerja tanpa upah dan mereka yang berani menentang pemerintah akan dikenakan hukuman yang keras termasuk dilakukan penyiksaan. Disamping itu, kasus penganiayaan dan penghilangan orang pada etnis rohingya yang dilakukan oleh junta militer Myanmar telah terus-menerus terjadi sehingga banyak etnis rohingya yang melarikan diri ke negara tetangga.⁵

Dalam hal lain banyak terjadinya pelanggaran HAM yang serius, keterbatasan dalam kebebasan juga tengah terjadi di Myanmar. Pembentukan komite untuk menindak tegas berita palsu, materi pornografi, kritik politik yang melanggar standar kebebasan berekspresi internasional oleh *State Administration Council (SAC)* telah banyak dikritik oleh kelompok dan organisasi, termasuk

³ Hidayatulloh, M. A., & Dr. Nur Azizah, M. Si. (2018). THE ADVOCACY OF WOMEN'S REPRESENTATION IN PARLIAMENT IN MYANMAR BY LOCAL WOMEN'S MOVEMENT.

⁴ Brenner, D. (2024, March 4). Misunderstanding Myanmar Through the Lens of Democracy. *100(2)*, 751-769.

⁵ Amarasinghe, G. (2022, June 15). Myanmar: The Rohingya's Decade of Detention. *Human Rights Watch*.

Women's League of Burma (WLB) atas tindakan dan kebijakannya yang lebih banyak memberikan kerugian pada perempuan.⁶

State Administration Council (SAC) telah memberlakukan beberapa undang-undang Dinas Militer Rakyat yang bertuliskan bahwa wajib militer yang dipimpin negara untuk laki-laki dan perempuan. Undang-undang ini telah dikritik karena potensinya untuk melanggengkan kekejaman termasuk penggunaan wajib militer paksa untuk menculik kaum muda, anak-anak hingga pengungsi internal.⁷

Banyak organisasi keperempuanan yang telah mengecam *State Administration Council (SAC)* atas perannya dalam melanggengkan kekerasan dan militerisasi. Penggunaan undang-undang ini dalam perekrutan paksa perempuan tengah memperburuk keadaan dikarenakan adanya kerentanan terjadinya berbagai bentuk kekerasan pada perempuan di dalamnya.⁸ Disamping itu undang-undang ini telah menyebabkan kekacauan yang meluas karena adanya eksploitasi lebih dari 13 juta orang mengungsi untuk mengikuti wajib militer paksa.⁹ Ketidakstabilan administratif juga tengah terjadi yang nampak pada dampak perombakan sejumlah 152 orang dalam dewan dan kabinet yang telah dianggap merusak supremasi hukum dan stabilitas di Myanmar.¹⁰ Tindakan-tindakan yang dilakukan *State*

⁶ WomensOrg, I. (2024, March 8). *Women's Organizations Condemn Junta's Illegal Conscription Law in Myanmar | Women League of Burma*. Women's League Of Burma. Retrieved September 9, 2024

⁷ KHRG. (2023, December 23). *Striking Fear: Impacts of State Administration Council (SAC) shelling on villagers' lives in Southeast Burma (January to October 2023)*. *Karen Human Rights Group*.

⁸ *Ibid.*

⁹ San, A. (2023, July 27). *Shadow of Death: Use of civilians as human shields by the State Administration Council (SAC) in Southeast Burma since the coup*. *Karen Human Rights Group*.

¹⁰ ISP, A. (2024, February 29). *Naypyitawlogy – 4*. ISP-Myanmar. Retrieved September 9, 2024, from <https://ispmyanmar.com/ie-v02n03/>

Administration Council (SAC) merupakan bentuk nyata krisis kemanusiaan yang tidak hanya mempengaruhi perempuan tetapi juga populasi yang lebih luas. .

Tahun 2015 menjadi tahun penting untuk demokrasi di Myanmar, penyelenggaraan pemilu terbuka pertama setelah lebih dari dua dekade pada tanggal 8 November 2015.¹¹ *National League of Democracy (NLD)* yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi meraih kemenangan bersejarah dan mengamankan mayoritas dalam kedua kamar parlemen. Pemilihan umum ini dipandang sebagai langkah penting untuk menuju demokratisasi setelah puluhan tahun pemerintahan militer mengambil alih kekuasaan. Berbagai kelompok kepentingan, organisasi dan gerakan akar rumput semakin berani untuk memberikan suaranya terhadap demokrasi yang ada di Myanmar, *Women's League of Burma (WLB)* menjadi salah satunya.¹²

Pemerintah Myanmar telah memulai berbagai reformasi yang memiliki tujuan untuk mengkonsolidasikan demokrasi setelah adanya pemilihan umum yang memicu terbakarnya semangat dari masyarakat Burma. Namun, reformasi tersebut mendapatkan tantangan yang signifikan termasuk dalam keterbatasan konstitusi 2008 yang mempertahankan kekuasaan substansial bagi militer termasuk kontrol untuk kementerian utama dan jaminan 25% kursi dalam parlemen yang berakhir dengan ketidakberhasilan upaya ini. Kemudian terdapat konflik etnis yang berupaya untuk menegosiasikan perdamaian berbagai kelompok etnis pemberontak melalui *Nationwide Ceasefire Agreement (NCA)*.

¹¹ McKenna, A. (2024, September 10). *2021 Myanmar Coup D'etat | History, Facts, & Explained*. Britannica. from <https://www.britannica.com/event/2021-Myanmar-coup-d-etat>

¹² Thang, M. (2022, December 1). *Unrest in Myanmar after the coup of 2021 | T.wai*. Torino World Affairs Institute. from <https://www.twai.it/articles/unrest-myanmar-after-coup-2021/>

Ditengah banyaknya permasalahan yang dihadapi Myanmar, *Women's League of Burma (WLB)* hadir untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan demokrasi Myanmar. Berfokus pada pemberdayaan perempuan dan advokasi hak-hak perempuan yang telah menjadi garda terdepan dalam perjuangan demokrasi di Myanmar, *Women's League of Burma (WLB)* memberikan perannya meskipun mendapatkan tantangan berupa diskriminasi dan resiko tinggi terhadap adanya kekerasan (termasuk kekerasan seksual).

Setelah perjalanan panjang tersebut, adanya pandemi *Covid-19* memberikan tantangan yang lebih besar lagi pada dinamika politik yang terjadi di Myanmar. Penyempitan ruang gerak masyarakat dan kebebasan menjadi permasalahan utama yang muncul dikarenakan respon pemerintah yang ditujukan sebagai langkah dalam menghadapi pandemi. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa pemerintah telah memanfaatkan pandemi *Covid-19* untuk menekan adanya perbedaan pendapat, memberikan batasan masyarakat untuk berekspresi, dan mengekang masyarakat sipil untuk melakukan segala aktivitas termasuk aktivitas secara daring.¹³ Kondisi ini telah menyebabkan peningkatan kontrol dan pengawasan terhadap publik yang khususnya menasar para aktivis dan jurnalis yang tengah melakukan kritik penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu, adanya kudeta militer yang terjadi pada februari 2021 juga menyebabkan situasi semakin rumit. Rezim militer tengah memanfaatkan pandemi untuk memberikan pembenaran pada tindakan represif terhadap organisasi

¹³ Arifia, I. (2021). Pakar HI Unair: Rezim Militer Berpotensi Menjadi Masa Depan Myanmar. UnairNews:Surabaya. <https://unair.ac.id/pakar-hi-unair-rezim-militer-berpotensi-menjadi-masa-depan-myanmar/>

masyarakat yang bergerak untuk melemahkan kapasitas mereka dalam beroperasi secara efektif. Hingga banyak kelompok yang terlibat dalam konflik bersenjata dengan militer.¹⁴

Pada bulan November tahun 2020 pemilihan parlemen kembali digelar dan dimenangkan oleh *National League of Democracy (NLD)* yang meningkatkan jumlah kursinya juga. Hasil ini telah disambut dengan ketidakpuasan oleh *The Union Solidarity Development Party (USDP)* yang berpihak pada militer dan menuduh atas adanya kecurangan dalam pemilihan umum meskipun pemilu tersebut telah dikonfirmasi keabsahannya oleh pengamat internasional. Ketegangan tersebut semakin meningkat atas adanya tuntutan pembukaan parlemen pada 2021 oleh militer. Penahanan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin *National League of Democracy (NLD)* lainnya telah dilakukan dibawah komando Jenderal Min Aung Hlaing. Adanya hal tersebut memicu pembangkangan dan protes oleh sipil yang meluas di seluruh Myanmar. Sebagai tanggapan militer menggunakan kekerasan terhadap para demonstran yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Seiring dengan berlanjutnya protes, perlawanan bersenjata mulai muncul terhadap junta. Berbagai kelompok etnis yang bersenjata melakukan operasi secara intensif terhadap pasukan militer pemerintahan. Pembentukan kelompok-kelompok baru seperti *People's Defence Force (PDF)* juga terjadi yang ditujukan untuk menentang junta. Pada pertengahan tahun 2021 kelompok-kelompok ini semakin

¹⁴ Mottet, É., & Boniface, P. (2023, December 15). *Burma: What Political and Geopolitical Outlook after the Offensive Launched by Armed Ethnic Groups?* IRIS - Institut de Relations Internationales et Stratégiques.

meluas dan mulai melakukan kerjasama dengan faksi pemberontak lainnya guna menentang kendali militer pada beberapa wilayah di Myanmar.

Berkaitan dengan permasalahan yang tengah dihadapi Myanmar bersamaan dengan pandemi *Covid-19* telah mengakibatkan krisis kemanusiaan termasuk peningkatan pada pelanggaran HAM. *Women's League of Burma (WLB)* mengubah strateginya untuk memberdayakan perempuan dan memperjuangkan demokrasi dikala pandemi *Covid-19* dengan melakukan strategi melalui peralihan pada media digital serta membagi fokusnya pada kesehatan dan kemanusiaan dikarenakan banyaknya dampak yang sangat berhubungan dengan proses politik.

Dikaitkan dengan konsep kelompok kepentingan dengan sifat asosiasional guna melihat bagaimana strategi *Women's League of Burma (WLB)* secara spesifik ketika harus berjalan dengan adanya pandemi *Covid-19* dalam memperjuangkan demokrasi dan hak-hak perempuan. Juga konsep pemberdayaan perempuan untuk strategi advokasi yang dilakukan *Women's League of Burma (WLB)*. Dikala itu banyak dilakukan penangkapan dan kekerasan pada pejuang demokrasi perempuan di Myanmar serta pembatasan terhadap akses informasi sehingga menyebabkan semakin buruknya situasi politik di negara ini.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan *Women's League of Burma (WLB)* dalam memperjuangkan demokrasi Myanmar yang rentan, terkhusus pada masa pandemic *Covid-19*.

¹⁵ IDS. (2022, March 22). *The Impact of Myanmar's Response to Covid-19 on the Most Vulnerable (accessible version)*. Institute of Development Studies. Retrieved September 26, 2024, from <https://www.ids.ac.uk/publications/the-impact-of-myanmars-response-to-Covid-19-on-the-most-vulnerable-accessible-version/>

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah akan menjadi dasar dan arah dalam penelitian yang akan dibahas ini. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk meneliti tentang “Bagaimana Upaya *Women's League of Burma (WLB)* dalam Memperjuangkan Demokrasi di Myanmar Khususnya pada Masa Pandemi *Covid-19?*”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya *Women's League of Burma (WLB)* dalam memperjuangkan demokrasi yang ada di Myanmar, khususnya pada masa pandemi *Covid-19*. Myanmar tengah menghadapi pemerintah rezim militer, pelanggaran HAM, keterbatasan dalam kebebasan dan adanya krisis demokrasi. Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya kudeta dan pandemi *Covid-19* dalam waktu yang bersamaan telah memberikan tantangan yang lebih besar untuk dinamika politik dan perkembangan demokrasi yang ada di Myanmar. Hal yang dapat digarisbawahi dalam penelitian ini mengacu pada tujuan dalam mengkaji bagaimana *Women's League of Burma (WLB)* beradaptasi dan melanjutkan perjuangannya untuk demokrasi serta hak perempuan Myanmar dalam konteks yang lebih sulit dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penulis berharap secara akademis penelitian ini dapat memberi pengetahuan dan wawasan baru pada semua pembaca, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi penelitian baru selanjutnya. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional terkait pemberdayaan perempuan, upaya yang dilakukan oleh *Women's League of Burma (WLB)* yang dipandang sebagai kelompok kepentingan yang mendorong pergerakan demokrasi melalui strategi dan program yang dilakukan di Myanmar.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi penulis serta pembaca yang ingin memahami isu-isu pemberdayaan perempuan, *Women's League of Burma (WLB)*, dan perkembangan demokrasi suatu Negara yang dibangkitkan oleh perjuangan perempuan dengan melihat dari sudut pandang *Women's League of Burma (WLB)* sebagai kelompok kepentingan di Negara tersebut yang bersamaan dengan terjadinya pandemi *Covid-19* di Myanmar. Khususnya Pengembangan strategi kritis yang dilakukan oleh *Women's League of Burma (WLB)* selama pandemi *Covid-19* melalui pemberdayaan perempuan, advokasi dan *lobbying* dengan menggunakan sosial media guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak dapat lepas dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga untuk menegaskan originalitas penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk di-review. Penelitian terdahulu yang akan dibahas merupakan penelitian literatur yang membahas mengenai *Women's League of Burma (WLB)*, krisis kemanusiaan dan dinamika demokrasi di Myanmar serta peran organisasi, gerakan hingga kelompok kepentingan dalam memperjuangkan demokrasi dan HAM di Myanmar.

Penelitian terdahulu pertama merupakan jurnal yang ditulis oleh **Jennifer A. Quegley** dengan judul "*The Women's League of Burma's Advocacy Team : The Obstacles Many, Their Numbers Few, Their Voices Powerful and Their Strength Immeasurable - Seeking Justice Where There is None*"¹⁶ Penelitian ini membahas mengenai bagaimana upaya *Women's League of Burma (WLB)* untuk mencapai perubahan positif bagi perempuan Burma melalui advokasi internasional. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meneliti bagaimana *Women's League of Burma (WLB)* mengkomunikasikan masalah kompleksnya melalui observasi partisipatif, wawancara, dan analisis dokumen dengan mempelajari apa dan bagaimana perwakilan *Women's League of Burma (WLB)* menyampaikan situasi mengerikan para perempuan Burma. Termasuk juga dalam memperjuangkan kebebasan yang mereka inginkan dari pemerintah, lembaga anggota PBB, donor, LSM lain, tetangga negara, dan pemerintah yang berpikiran sama.

¹⁶ Quigley, Jennifer A., "The Women's League of Burma's advocacy team : the obstacles many, their numbers few, their voices powerful and their strength immeasurable - seeking justice where there is none" (2005). *Capstone Collection*. 341.

Penelitian ini menggunakan teori *social movement* untuk melihat bagaimana upaya *Women's League of Burma (WLB)* untuk mencapai perubahan positif bagi perempuan Burma melalui advokasi internasional. Para perempuan mewakili banyak kelompok etnis yang berbeda dan memiliki pengalaman yang berbeda meliputi berbagai macam hambatan untuk dihadapi, tetapi dengan bekerja bersama *Women's League of Burma (WLB)* telah menunjukkan kekuatan dalam persatuan dengan menonjolkan keragaman yang dimiliki.

Women's League of Burma (WLB) telah berhasil melampaui hambatan advokasi tradisional untuk menyatukan kerja akar rumput dengan advokasi internasional. Mereka memiliki pemahaman yang jelas dan dokumentasi yang sangat baik tentang masalah dan akar penyebabnya. Termasuk didalamnya yang merupakan hubungan sebab akibat antara situasi lokal, kebijakan nasional, dan aktor internasional. *Women's League of Burma (WLB)* dan organisasi anggotanya berjuang untuk mengatasi kurangnya akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, layanan sosial, keselamatan dan keamanan, dan ruang politik. Hal ini membuat mereka menjadi contoh dari pengungsi pribumi dan perempuan migran yang terpinggirkan yang berusaha untuk menciptakan masyarakat yang damai dengan menggunakan advokasi internasional.

Penelitian terdahulu kedua merupakan jurnal yang ditulis oleh **Ginger Norwood & Cheery Zahau** dengan judul "*Fostering a Grassroots Women's Movement through Feminist Leadership on the Burma-India Border*"¹⁷ Penelitian ini membahas mengenai bagaimana metodologi dan proses program pelatihan

¹⁷ Noorwood, G., & Zahau, C. (2011, June 29). *Fostering a Grassroots Grassroots Women's Movement through Feminist Leadership on the Burma-India Border*.

kepemimpinan feminis dengan perempuan akar rumput dari Burma yang tinggal di perbatasan Burma-India. Program pelatihan tersebut merupakan kemitraan kolaboratif antara *Women's League of Chinland (WLC)* yang berbasis di India Timur Laut, dan *International Women's Partnership for Peace and Justice (IWP)*, yang berbasis di Thailand.

Membahas mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan feminis dan tentang bagaimana kerangka kepemimpinan dipilih melalui diskusi tentang organisasi, hubungan kerja, serta metodologi dan program pelatihan. Disimpulkan bahwa dengan refleksi atas pembelajaran dan menyoroti kemungkinan serta tantangan aktivis feminis transnasional dalam memajukan partisipasi publik dan politik perempuan China di Burma.

Penelitian terdahulu ketiga merupakan jurnal yang ditulis oleh **Andrea D. Friedman** dengan judul "*Using the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women to Advocate for the Political Rights of Women in a Democratic Burma*"¹⁸ membahas mengenai bagaimana perempuan dapat turut serta dalam adanya konstitusi baru di Myanmar. Dimana kekuatan untuk Burma yang demokratis tetap berkembang kuat meskipun tindakan kejam yang diambil oleh rezim berkuasa telah memaksa mayoritas yang memperjuangkan demokrasi untuk berada di pengasingan. Kelompok-kelompok yang berada di pengasingan ini disatukan oleh perjuangan penting untuk membawa perdamaian ke Burma setelah puluhan tahun hingga sampai saat ini masih mengalami kekerasan. Adanya penyertaan perempuan dalam upaya perjuangan di Myanmar telah dikesampingkan

¹⁸ Friedman, A. D. (2005). *Using the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women to Advocate for the Political Rights of Women in a Democratic Burma*.

atas nama perjuangan yang lebih besar, diasumsikan bahwa kesetaraan akan ditangani begitu ada demokrasi yang pada realitanya kenyataan ini juga melemahkan demokrasi.

Penting untuk pembentukan Burma yang demokratis adalah dengan dimasukkannya perempuan dalam semua langkah pembangunan bangsa, seperti negosiasi perdamaian, pemerintahan transisi, penyusunan konstitusi, dan pengadilan kejahatan perang. Kelompok yang memperdebatkan demokrasi dan supremasi hukum harus hidup sesuai dengan keinginan mereka, mengatur panggung untuk demokrasi sejati dengan memastikan inklusi perempuan.

Penelitian ini menggunakan **metodologi kualitatif** untuk menguji sejauh mana kontribusi Uni Eropa dalam promosi demokrasi telah mendorong peningkatan demokrasi di Myanmar dengan berdasarkan tiga model promosi demokrasi, yaitu *linkage, leverage dan governance*. Tujuan penelitian ini juga untuk memberikan pengetahuan model mana yang paling efektif bagi Uni Eropa dalam memperkuat demokrasi di Myanmar. Berdasarkan studi ini, dapat dikatakan bahwa Uni Eropa telah berkontribusi dalam peningkatan demokrasi, dengan model aliansi dan tata kelola dianggap sebagai solusi paling efektif untuk mempromosikan demokrasi di negara tersebut. Tetapi, model *leverage* dirasa tidak cukup untuk diterapkan dalam implementasi demokrasi Myanmar. Beberapa komponen dari model ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam tuntutan politik sebagai sarana untuk mempromosikan demokrasi. Karena hal yang dilakukan Uni Eropa terhadap Myanmar selama ini tidak memaksakan syarat politik.

Penelitian terdahulu keempat merupakan jurnal yang ditulis oleh **Magda Lorena Cardenas** dengan judul “*Women to Women Diplomacy and Women’s League of Burma*”¹⁹ membahas tentang kontribusi perempuan untuk pembangunan perdamaian di Myanmar melalui investigasi pada *Women’s League of Burma (WLB)* sebagai forum diplomasi perempuan pada perempuan. Dipahami sebagai strategi pembangunan perdamaian alternatif berdasarkan interaksi perempuan menuju tujuan bersama untuk mencapai persamaan hak-hak perempuan. Memiliki tujuan untuk meneliti bagaimana diplomasi dari perempuan ke perempuan terjadi di Myanmar.

Penelitian ini berfokus pada berbagai bidang dan strategi yang dicakup oleh diplomasi perempuan ke perempuan dalam menentang narasi konflik yang meluas dan mendorong dialog antar etnis. Kasus Myanmar mencontohkan perjuangan perempuan untuk inklusi dan partisipasi yang berarti dalam penyelesaian konflik dan penciptaan perdamaian. Pada penelitian ini disajikan analisis sejarah perempuan sebagai aktor politik dan pembawa damai di Myanmar, memajukan kontribusi teoritis diplomasi perempuan-ke-perempuan sebagai strategi pembangunan perdamaian alternatif dan menganalisis diplomasi perempuan-ke-perempuan di WLB dan strategi mereka untuk mempengaruhi agenda politik di Myanmar. Ini membahas kontribusi WLB untuk transformasi narasi konflik yang dominan dan penciptaan *platform* untuk kerja sama antar etnis.

Penelitian terdahulu kelima merupakan jurnal yang ditulis oleh **Putri Rahma Asri** dengan judul “*Analisis Lambannya Adopsi rencana Aksi Nasional*”

¹⁹ Cardenas, M. L. (2019). *Women to Women Diplomacy and Women’s League of Burma*.

*resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 sebagai Implementasi Women, Peace and Security (WPS) Agenda di Myanmar*²⁰ membahas tentang analisis gender sebagai faktor terjadinya pemerintahan otoriter di Myanmar. Kompleksitas konflik disederhanakan dengan memusatkan perhatian pada laki-laki sebagai satu-satunya actor dengan mengesampingkan pengalaman dan perspektif perempuan.

Dinamika ini muncul di Myanmar selama perang saudara dan pemerintahan militer telah menciptakan rasa tidak aman di kalangan perempuan Myanmar. Tetapi pada saat itu Myanmar gagal mengubah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (UNSCR) menjadi *National Adaptation Plans (NAP)* untuk memastikan keselamatan perempuan dalam situasi konflik. Proses adopsi ini masih berada pada tahap awal, sedangkan Myanmar tetap mengacu pada *National Strategic Plan for the Advancement of Women (NSPAW)* yang tidak relevan dengan implementasi program *Women, Peace and Security (WPS)*. Oleh karena itu, tujuan dari studi eksplanatori kualitatif ini adalah untuk memahami alasan lambatnya adopsi RAN UNSCR 1325 di Myanmar dengan menggunakan **konsep feminis institusionalis** tentang sistem gender dan konsep feminis security studies tentang status.

Berdasarkan analisis, ada dua faktor yang menyebabkan lambatnya adopsi. Pertama, antara tahun 2011 dan 2022, institusi Myanmar tidak responsif terhadap isu gender, dan institusi Myanmar mengalami kemunduran dari kehadiran feminis dan sistem respons laki-laki menjadi sistem hegemoni laki-laki, yang mengarah ke

²⁰ Asri, P. R. (2023). *Analisis Lambannya Adopsi Rencana Aksi Nasional Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 sebagai Implementasi Women, Peace and Security (WPS) Agenda di Myanmar* / Asri / *Journal of International Relations*. Page 12-15

politik buta gender. Kedua, posisi keamanan pemerintah Myanmar bertentangan dengan norma Resolusi 1325. Menghasilkan pada pelaksanaan NSPAW 2013-2022 mendorong mereka untuk memastikan kepatuhan perempuan dalam situasi konflik.

Penelitian terdahulu keenam merupakan jurnal yang ditulis oleh **Muhammad Ammar Hidayatulloh** dengan judul “*The Advocacy of Women’s Representation in Parliament in Myanmar By Local Women’s Movement*”²¹ membahas tentang proses advokasi. Dimana perempuan di Myanmar telah mengalami kekurangan dalam representasi di Parlemen yang menyebabkan perempuan lebih rentan dalam keterwakilan dalam semua aspek. Namun, dalam penelitian ini dibahas terdapat kenaikan representasi perempuan dalam parlemen sebesar 3,7% dari tahun 2010 menjadi sebesar 10,08% pada tahun 2015. Penelitian ini menghasilkan bahwa gerakan perempuan lokal telah memainkan peran sentral dalam mengadvokasi permasalahan untuk meningkatkan perempuan sebagai anggota parlemen. Ditunjukkan bahwa terdapat beberapa proses advokasi untuk meningkatkan jumlah perempuan untuk tergabung menjadi parlemen di Myanmar, yaitu: membentuk gerakan perempuan lokal untuk membangun jaringan dengan *International Nongovernmental Organizations (INGO)* karena tidak berfungsinya hubungan dengan pemerintah dan *International Nongovernmental Organizations (INGO)* yang mengangkat isu yang terjadi dalam tingkat internasional untuk mendorong bantuan oleh negara lain dan *United Nations (UN)* untuk menekan pemerintahan militer Myanmar.

²¹ Asri, P. R. (2023). *Analisis Lambannya Adopsi Rencana Aksi Nasional Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 sebagai Implementasi Women, Peace and Security (WPS) Agenda di Myanmar* / Asri / *Journal of International Relations*. Page 12-15

Penelitian terdahulu ketujuh merupakan jurnal yang ditulis oleh **Amanda Gouws & Azille Coetzee** dengan judul “*Women’s Movements and Feminist Activism*”²² membahas terkait perempuan di Afrika Selatan telah mengalami kekurangan dalam memberikan perannya di ranah politik. Penelitian ini membahas tentang studi perbandingan yang menarik tentang gerakan perempuan di Kamerun, Mozambik, dan Uganda. Mereka mempelajari tentang gerakan-gerakan perempuan baru yang dibentuk dengan agenda kepemimpinan, dan pendanaan. Organisasi keperempuanan ini berfokus pada keterlibatan dengan politik kelembagaan melalui kampanye untuk representasi perempuan yang lebih besar dalam ranah pemerintahan. Dalam hal upaya memperluas agenda pembangunan untuk mencakup masalah-masalah politik guna menemukan solusi dalam masalah pembangunan.

Berfokus pada periode transisi menuju demokrasi, aktivitas feminis secara historis yang sering mengarah pada penciptaan struktur di Negara dalam rangka mempromosikan penciptaan kesetaraan gender. Organisasi ini melakukan penyelidikan untuk dampak aktivitas gerakan perempuan terhadap kebijakan transformasi gender dalam masyarakat demokratis melalui penelitian dengan menggunakan konsep feminis. Dengan menggunakan sampel sejumlah 33 perempuan yang bekerja dan menduduki posisi kepemimpinan di dalam 46 departemen pemerintahan. Penelitian ini juga berfokus dalam Pengarusutamaan

²² Asri, P. R. (2023). *Analisis Lambannya Adopsi Rencana Aksi Nasional Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 sebagai Implementasi Women, Peace and Security (WPS) Agenda di Myanmar* / Asri / *Journal of International Relations*. Page 12-15

Gender dan Kesetaraan pekerjaan sebagai sebuah dorongan untuk kebijakan transformasi gender di Afrika Selatan.

Penelitian terdahulu kedelapan merupakan jurnal yang ditulis oleh **Miemie Winn Byrd** dengan judul “*Women’s on The Front Lines in Myanmar Fights for Democracy*”²³ membahas perempuan yang menjadi tulang punggung revolusi di Myanmar. Perempuan telah mampu meningkatkan kapasitas mereka untuk mobilisasi sosial dan jaringan. Terdapat juga kerja sama yang belum pernah terjadi sebelumnya antara berbagai kelompok perempuan etnis dalam menanggapi kudeta. Mereka telah mampu memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook untuk mensosialisasikan ide-ide mereka dan memobilisasi masyarakat untuk bertindak. Perempuan Myanmar telah berdaya untuk memimpin pemberontakan kali ini. Mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin upaya dalam memperjuangkan revolusi demokrasi di Myanmar. Menggunakan metode penelitian *Social Movement* dalam menganalisis peran perempuan sebagai penginisiasi perjuangan demokrasi di Myanmar.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Jenis Penelitian	Hasil
1.	Jennifer A. Quegley	Deskriptif Kualitatif dengan	Dapat disimpulkan bahwa <i>Women’s league of Burma</i>

²³ Asri, P. R. (2023). *Analisis Lambannya Adopsi Rencana Aksi Nasional Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 sebagai Implementasi Women, Peace and Security (WPS) Agenda di Myanmar* / Asri / *Journal of International Relations*. Page 12-15

	<p><i>The Women's League of Burma's Advocacy Team : The Obstacles Many, Their Numbers Few, Their Voices Powerful and Their Strength Immeasurable - Seeking Justice Where There is None</i></p>	<p>menggunakan Teori Social Movement</p>	<p>(WLB) telah berhasil melampaui hambatan advokasi tradisional untuk menyatukan kerja akar rumput mereka dengan advokasi internasional. Mereka memiliki pemahaman yang jelas dan dokumentasi yang sangat baik tentang masalah dan akar penyebabnya, dan hubungan sebab akibat antara situasi lokal, kebijakan nasional, dan aktor internasional.</p>
2.	<p>Ginger Norwood & Cheery Zahau</p>	<p>Deskriptif Kualitatif menggunakan</p>	<p>Disimpulkan bahwa dengan adanya refleksi atas</p>

	<i>Fostering a Grassroots Women's Movement through Feminist Leadership on the Burma-India Border”</i>	Teori Feminisme	pembelajaran dan menyoroti kemungkinan dan tantangan aktivis feminis transnasional dalam memajukan partisipasi publik dan politik perempuan China di Burma.
3.	Andrea D. Friedman <i>Using the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women to Advocate for the Political Rights of Women in a Democratic Burma</i>	Deskriptif Kualitatif Menggunakan Teori Feminisme	Disimpulkan bahwa penting untuk membentuk Burma yang demokratis adalah dengan dimasukkannya perempuan dalam semua langkah pembangunan bangsa, seperti negosiasi perdamaian, pemerintahan transisi, penyusunan

			konstitusi, dan pengadilan kejahatan perang.
4.	Magda Lorena Cardenas <i>Women to Women Diplomacy and Women's League of Burma</i>	Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan Konsep <i>Feminis Security</i>	Disimpulkan bahwa <i>Women's League of Burma (WLB)</i> memberikan kontribusinya pada penciptaan platform kerjasama antar etnis yang ditujukan untuk strategi pembangunan perdamaian dan menganalisis bagaimana diplomasi antar perempuan terjadi di Myanmar.
5.	Putri Rahma Asri <i>Analisis Lambannya Adopsi rencana Aksi Nasional resolusi Dewan Keamanan</i>	Kualitatif Deskriptif dengan Menggunakan Konsep	Disimpulkan bahwa terdapat faktor yang memperlambat adopsi, yaitu: institusi Myanmar sejak 2011

	<p><i>PBB 1325 sebagai Implementasi Women, Peace and Security (WPS) Agenda di Myanmar</i></p>	<p>Feminis Institusionalis</p>	<p>hingga 2022 yang tidak bersepakat dengan isu gender sehingga menyebabkan terjadinya regresi yang diakibatkan oleh kehadiran feminisme dan pemerintah Myanmar dalam memandang keamanan bertentangan dengan resolusi 1325.</p>
<p>6.</p>	<p>Muhammad Ammar Hidayatulloh</p> <p><i>The Advocacy of Women;s Representation in Parliament in Myanmar By Local Women's Movements</i></p>	<p>Kualitatif Deskriptif dengan Menggunakan Pola Bumerang Dari Keck dan Sikkink</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa gerakan perempuan lokal telah memainkan peran sentral dalam mengadvokasi permasalahan untuk meningkatkan</p>

			<p>perempuan sebagai anggota parlemen. Ditunjukkan bahwa terdapat beberapa proses advokasi untuk meningkatkan jumlah perempuan untuk tergabung menjadi parlemen di Myanmar.</p>
7.	<p>Amanda Gouws & Azille Coetzee <i>Women's Movements and Feminist Activism</i></p>	<p>Kualitatif Deskriptif dengan Menggunakan Konsep Feminis</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki fokus penelitian dalam Pengarusutamaan Gender dan Kesetaraan pekerjaan sebagai sebuah dorongan untuk kebijakan transformasi gender di Afrika Selatan.</p>

			<p>Dengan organisasi keperempuanan ini berfokus pada keterlibatan dengan politik kelembagaan melalui kampanye untuk representasi perempuan yang lebih besar dalam ranah pemerintahan. Dalam hal upaya memperluas agenda pembangunan untuk mencakup masalah-masalah politik untuk menemukan solusi dalam masalah pembangunan.</p>
8.	Miemie Winn Byrd	<p>Penelitian Kualitatif Deskriptif dengan</p>	<p>Perempuan telah mampu meningkatkan kapasitas mereka untuk mobilisasi</p>

	<p><i>Women on The Front Lines in Myanmar's Fight for Democracy</i></p>	<p>menggunakan Teori <i>Social Movement</i></p>	<p>sosial dan jaringan. Ada juga kerja sama yang belum pernah terjadi sebelumnya antara berbagai kelompok perempuan etnis dalam menanggapi kudeta. Mereka telah mampu memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook untuk mensosialisasikan ide-ide mereka dan memobilisasi masyarakat untuk bertindak. Perempuan Myanmar merasa berdaya untuk memimpin pemberontakan kali</p>
--	---	---	--

		<p>ini. Mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin upaya memperjuangkan revolusi demokrasi di Myanmar.</p> <p>Menggunakan metode penelitian <i>Social Movement</i> dalam menganalisis peran perempuan sebagai penginisiasi perjuangan demokrasi di Myanmar.</p>
--	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait *Women's League of Burma (WLB)*, organisasi, gerakan sosial perempuan yang ada di Myanmar hingga negara lain dapat disimpulkan bahwa perempuan yang ada di Myanmar dan negara lain yang memiliki masalah serupa ingin memperjuangkan haknya melalui berbagai macam cara. Kelompok kepentingan hingga gerakan sosial serta pembuatan organisasi yang mewadahi perempuan-perempuan dibuat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

Tantangan dan juga ancaman telah dihadapi dalam memperjuangkan hak perempuan hingga demokrasi yang ada di Myanmar. Promosi melalui berbagai model telah dilakukan dengan cara membuat *platform* kerjasama antar etnis, promosi melalui *linkage*, kerjasama dengan aktor internasional telah dilakukan. Adapun peluang yang dapat dimaksimalkan yaitu dengan mobilisasi digital dengan memanfaatkan media sosial dan platform daring untuk meningkatkan kesadaran dan memobilisasi dukungan, menunjukkan ketahanan dan inovasi dalam advokasi. Juga solidaritas global dalam menghadapi serta menyoroti isu-isu global dan hak asasi manusia, yang memungkinkan untuk menghubungkan perjuangan mereka untuk demokrasi dengan yang lebih luas untuk Myanmar.

Beberapa penelitian yang membahas terkait *Women's League of Burma (WLB)* juga telah mempelajari terkait kebutuhan dari perempuan dari berbagai etnis yang ada di Myanmar. Akar penyebab dari permasalahan dan hubungan sebab akibat antara situasi lokal, kebijakan nasional, dan aktor internasional juga tengah diteliti oleh organisasi keperempuanan ini untuk mendapatkan ruang bagi perempuan yang ada di Myanmar serta tercapainya demokrasi.

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian yang membahas mengenai *Women's League of Burma (WLB)*, demokrasi, dan pandemi *Covid-19* yang akan dianalisis menggunakan konsep yaitu:

1.5.1 Konsep *Interest Group*

Kelompok kepentingan merupakan sebuah asosiasi individu ataupun organisasi yang atas dasar satu atau lebih kepentingan bersama dengan tujuan untuk berupaya mempengaruhi kebijakan publik guna kepentingan atau tujuan sebuah organisasi atau asosiasi individu tersebut.²⁴ Sasaran dari kelompok kepentingan ini dapat berupa kebijakan secara eksklusif atau menguntungkan anggota kelompok atau satu segmen masyarakat. Kelompok kepentingan akan berusaha mencapai sasaran mereka dengan melobi dan menekan para pembuat kebijakan guna memperoleh hasil kebijakan yang menguntungkan bagi kelompok mereka. Hubungan antara politik dan kepentingan tidak bisa dipisahkan karena kepentingan merupakan aspek yang lazim, pamanen dan penting dalam sebuah rezim demokratis, otoriter, hingga totaliter.

Kelompok kepentingan tengah hadir dalam semua tingkat pemerintahan, baik nasional, negara bagian, provinsi hingga lokal yang menempati sebuah peran penting dalam urusan internasional. Adapun artikulasi kelompok kepentingan menurut Gabriel A. Almond yang diidentifikasi melalui empat jenis kelompok kepentingan dan mengartikulasikan kebutuhan dalam suatu sistem politik:

1. Kelompok Anomik yang merupakan kelompok bersifat spontan dan muncul sebagai respons terhadap frustrasi tertentu, yang sering kali tidak memiliki organisasi formal.

²⁴ Thomas, C. S. (2024, September 16). *Interest group | Definition, Examples, Types, Politics, & Facts*. Britannica. Retrieved September 22, 2024

2. Kelompok Non-asosiasi merupakan sebuah kelompok yang kurang terorganisasi dan biasanya bergerak di sekitar isu-isu tertentu, dengan berbagi identitas yang sama.
3. Kelompok Institusional dengan memiliki struktur dan fungsi formal yang lebih dari sekadar mewakili kepentingan tertentu.
4. Kelompok Asosiasional yang dibentuk secara eksplisit untuk mewakili kepentingan kelompok tertentu, kelompok ini adalah yang paling terorganisasi dan berfokus pada tujuan tertentu.

Dihubungkan dengan *Women's League of Burma (WLB)* yang merupakan contoh kelompok asosiasional karena didirikan secara khusus untuk mengadvokasi hak-hak perempuan dan pemerintahan yang demokratis di Myanmar. *Women's League of Burma (WLB)* telah beroperasi dalam lanskap politik dengan menantang yang dicirikan oleh pemerintahan militer dan meluasnya pelanggaran hak asasi terhadap manusia. Dengan kegiatan *Women's League of Burma (WLB)* yang meliputi advokasi dan *lobbying* termasuk terlibat dengan organisasi internasional dan pemerintah asing untuk meningkatkan kesadaran tentang penderitaan perempuan di Myanmar; mobilisasi publik dengan mengorganisir protes dan kampanye untuk menggalang dukungan bagi reformasi demokrasi; membangun koalisi dan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk memperkuat suara dan dampaknya.

Dengan menerapkan teori kelompok kepentingan oleh Gabriel A. Almond, para peneliti dapat lebih memahami bagaimana *Women's League of Burma (WLB)* menavigasi tantangan ini sembari berusaha mengartikulasikan kepentingan mereka

dalam konteks aspirasi demokrasi Myanmar yang lebih luas. Analisis ini menyoroti pentingnya kelompok kepentingan dalam membentuk wacana politik dan hasil kebijakan, khususnya dalam rezim yang represif. Teori kelompok asosiasional secara khusus dibentuk untuk mewakili kepentingan atau isu tertentu. Kelompok Asosiasional dalam teori oleh Gabriel A. Almond yang dicirikan oleh pembentukan sebuah kelompok secara eksplisit guna memperjuangkan isu atau kepentingan tertentu.²⁵ Memperhatikan struktur sebuah kelompok kepentingan dimana memiliki struktur formal, keanggotaan, dan tujuan yang ditetapkan, dan dalam hal ini juga memiliki tujuan terfokus utama mereka adalah mempengaruhi kebijakan atau opini publik terkait kepentingan khusus mereka.

Teori ini memiliki relevansi dalam menyampaikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat kepada pengambil keputusan politik. Proses yang terdapat didalamnya termasuk artikulasi kepentingan yang berarti mengidentifikasi serta menyampaikan kebutuhan spesifik kepada pemerintah; agregasi kepentingan dimana hal ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai tuntutan menjadi satu suara kolektif untuk mempengaruhi kebijakan; serta adanya komunikasi politik yang berguna untuk menjalin komunikasi antara anggota kelompok dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini *Women's League of Burma (WLB)* berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yaitu advokasi dan pemberdayaan perempuan, mobilisasi dan pengorganisasian, pendidikan dan adanya kesadaran perempuan

²⁵ Thomas, C. S. (2024, September 16). *Interest group | Definition, Examples, Types, Politics, & Facts*. Britannica. Retrieved September 22, 2024

terkait isu-isu yang sedang dihadapi, penggalangan dana dan melakukan dukungan, hingga terkoneksi dengan jaringan internasional.²⁶

Dalam melakukan hal ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan teori kelompok kepentingan asosiasional oleh Gabriel A. Almond yang mana hal ini meliputi:

1. Identifikasi Isu dan Tujuan

Kelompok kepentingan asosiasional pertama-tama mengidentifikasi isu-isu yang relevan dan penting bagi anggotanya. Mereka menetapkan tujuan yang jelas untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, baik itu untuk advokasi kebijakan, penggalangan dukungan, atau peningkatan kesadaran masyarakat.

2. Penggalangan Dukungan

Grass-roots Pressure yang mana kelompok ini sering melakukan penggalangan dukungan dari masyarakat lapis bawah melalui berbagai cara, seperti rapat akbar, pawai massal, demonstrasi, atau aksi teatral di tempat-tempat umum.²⁷ Ini bertujuan untuk menciptakan tekanan publik terhadap pemerintah agar memperhatikan isu yang diangkat.

3. Penggunaan Media Massa

Media massa yang digunakan sebagai sarana untuk menarik perhatian publik dan pemerintah terhadap isu-isu tertentu.²⁸ Pesan-pesan yang

²⁶ Byrd, M. W. (2023, January 31). *Perempuan menjadi kunci bagi gerakan pro-demokrasi Myanmar – Indo-Pacific Defense Forum*. Indo-Pacific Defense Forum. Retrieved September 26, 2024, from <https://ipdefenseforum.com/id/2023/01/perempuan-menjadi-kunci-bagi-gerakan-pro-demokrasi-myanmar/>

²⁷ Maiwan, M. (2016). Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik. *15*(2), 7-8. <https://core.ac.uk/download/pdf/295356642.pdf>

²⁸ *Ibid*

disampaikan melalui media diharapkan dapat memicu respons dari pemerintah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah yang dihadapi.

4. Artikulasi Aspirasi

Kelompok kepentingan asosiasional menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah dengan cara yang terorganisir. Mereka dapat melakukan ini melalui pertemuan langsung dengan pejabat pemerintah atau dengan mengajukan petisi dan dokumen resmi yang merangkum tuntutan mereka.²⁹

5. Konsultasi Publik

Dalam beberapa kasus, kelompok ini juga melibatkan masyarakat dalam diskusi terbuka untuk menghimpun masukan terkait kebijakan atau rencana kebijakan pemerintah. Ini membantu menciptakan basis dukungan yang lebih luas dan memastikan bahwa suara anggota kelompok didengar.

6. Evaluasi dan Monitoring

Setelah kegiatan dilaksanakan, kelompok kepentingan asosiasional biasanya melakukan evaluasi terhadap hasil dari kegiatan tersebut. Mereka juga dapat berperan sebagai pengawas terhadap implementasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan isu-isu yang mereka angkat.

1.5.2 Konsep Pemberdayaan Perempuan

Konsep pemberdayaan perempuan merupakan konsep yang membentuk perempuan yang memiliki kapasitas lebih besar dan mampu dalam memecahkan

²⁹ Muhyidin, T. P. A. (2018). Pendekatan dalam Sistem Analisis Politik. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.ut.ac.id/4306/1/ISIP4213-M1.pdf](https://repository.ut.ac.id/4306/1/ISIP4213-M1.pdf)

masalah dan membangun konsep.³⁰ Pemberdayaan perempuan merupakan strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan memberikan potensi sekaligus perannya dalam memperjuangkan kebutuhan politik di negaranya. Kesadaran mengenai peran yang dimiliki oleh perempuan dapat diwujudkan melalui pendekatan program perempuan. Adapun langkah-langkah pemberdayaan perempuan, yaitu tahap pembentukan perilaku perempuan menuju perilaku yang sadar akan kebutuhan peningkatan kapasitas diri, tahap berikutnya merupakan tahap transformasi kemampuan yang merupakan peningkatan kapasitas, dan yang terakhir merupakan tahapan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan yang diharapkan dapat meningkatkan inisiatif pada kemandirian perempuan

Konsep ini dihubungkan dengan teori pemberdayaan oleh Jimmy Bayes yang merupakan penulis buku “Pemberdayaan: Memahami Teori Dibalik Pemberdayaan” memberikan gambaran komprehensif tentang teori dan berbagai aspeknya, termasuk pemberdayaan sosial, struktural, psikologis, dan *divine empowerment*. Penelitian Jimmy Bayes tentang pemberdayaan menekankan pentingnya mengintegrasikan berbagai aspek pemberdayaan untuk mengembangkan model yang komprehensif. Berlanjut pada pendapatnya bahwa diperlukan suatu teori terpadu yang menggabungkan semua dimensi ini, karena penelitian saat ini berfokus terutama pada satu atau dua aspek pemberdayaan. *Empowerment theory* oleh Jimmy Bayes dapat digunakan untuk memahami kompleksitas pemberdayaan dan penerapannya dalam berbagai konteks, termasuk lingkungan sosial, organisasi, dan pribadi.

³⁰ Ihsan, M. A., & Palu, I. (2019, November 4). *PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT KONSERVATIF* / *Musawa: Journal for Gender Studies*

Terbentuknya kelompok kepentingan *Women's League of Burma (WLB)* yang merupakan bukti nyata adanya perkembangan pada pemberdayaan perempuan sehingga terbentuknya sebuah kelompok kepentingan yang ada di Myanmar. Hal ini terlaksana dengan bukti adanya kepedulian dan juga harapan perempuan Myanmar akan pentingnya perubahan politik dan peningkatan kapasitas diri perempuan-perempuan yang ada di Myanmar. Perkembangan pemberdayaan perempuan ini terbukti atas kelompok kepentingan yang terbentuk secara bertahap hingga memiliki nama yang besar seperti saat ini.

Teori pemberdayaan Jimmy Bayes erat kaitannya dengan upaya *Women's League of Burma (WLB)* dalam mempromosikan demokrasi dan kesetaraan gender di Myanmar. Misi *Women's League of Burma (WLB)* adalah memberdayakan perempuan dan mendorong kesetaraan gender, yang sejalan dengan konsep pemberdayaan Bayes sebagai proses peningkatan kemampuan individu dan komunitas untuk mengendalikan kehidupannya dan mengambil keputusan.

Teori Jimmy Bayes menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek sosial, struktural, dan psikologis dalam pemberdayaan untuk mengembangkan model yang komprehensif.³¹ Hal ini sejalan dengan pendekatan *Women's League of Burma (WLB)* yang berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, peluang ekonomi, dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Upaya *Women's League of Burma (WLB)* untuk memberdayakan perempuan dan mendorong kesetaraan gender sangat erat kaitannya dengan teori pemberdayaan Bayes. Pekerjaan *Women's League of Burma (WLB)* dalam pemberdayaan perempuan mencakup

³¹ Ihsan, M. A., & Palu, I. (2019, November 4). *PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT KONSERFATIF* | *Musawa: Journal for Gender Studies*

memberikan pendidikan dan pelatihan, mempromosikan peluang ekonomi, dan mengadvokasi hak-hak perempuan. Upaya-upaya ini merupakan bagian dari model pemberdayaan Bayes yang komprehensif, yang menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek sosial, struktural, dan psikologis dari pemberdayaan.

Konsep pemberdayaan perempuan ini sangat erat kaitannya dengan upaya *Women's League of Burma (WLB)* dalam memperjuangkan demokrasi di Myanmar. Selaras dengan misi *Women's League of Burma (WLB)* yaitu memberdayakan perempuan dan mendorong kesetaraan gender dengan tujuan utama untuk mencapai demokrasi dan pembangunan berkelanjutan.³² Dimana prinsip utama oleh Jimmy Bayes merupakan:

1. Kesetaraan Gender

Prinsip ini menekankan pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan politik. Kesetaraan gender menjadi landasan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang.

2. Partisipasi Aktif

Pemberdayaan perempuan harus melibatkan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan, baik di tingkat keluarga, komunitas, maupun pemerintahan. Ini mencakup keikutsertaan dalam proses politik dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

3. Akses terhadap Sumber Daya

³² Ihsan, M. A., & Palu, I. (2019, November 4). *PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT KONSERFATIF* / *Musawa: Journal for Gender Studies*

Adapun akses yang dimaksud merupakan perempuan harus memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Akses ini penting untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berkontribusi secara sosial dan ekonomi.

4. Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender

Salah satu fokus utama dari pemberdayaan perempuan adalah penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ini mencakup kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang sering kali menghambat kemajuan perempuan dalam masyarakat.

5. Pendidikan dan Kesadaran

Pendidikan menjadi alat penting dalam pemberdayaan perempuan. Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan cara-cara untuk memperjuangkannya adalah kunci untuk memberdayakan mereka agar mampu mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Dengan menggunakan strategi pemberdayaan perempuan yang dipopulerkan oleh Jimny Bayes yaitu memiliki strategi efektif berupa:³³

1. Pendidikan dan pengembangan keterampilan yang mana kesempatan pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk meningkatkan keterampilan perempuan.
2. Partisipasi masyarakat atau perempuan dalam proses pengambilan keputusan masyarakat untuk memastikan suara mereka didengar.

³³ Ihsan, M. A., & Palu, I. (2019, November 4). *PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT KONSERFATIF* / *Musawa: Journal for Gender Studies*

3. Penerapan undang-undang dan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan.

Penjelasan tersebut termasuk dalam tantangan-tantangan perempuan di Myanmar yang menghambat pemberdayaan perempuan, termasuk hambatan budaya, diskriminasi, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan kesenjangan ekonomi. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan multi-aspek yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Konsep pemberdayaan perempuan memiliki keterkaitan erat dengan upaya *Women's League of Burma (WLB)* dalam memperjuangkan demokrasi di Myanmar. Misi *Women's League of Burma (WLB)* yang merupakan memberdayakan perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender di Myanmar dengan kepentingan untuk mencapai demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini sangat berkaitan karena terdapat beberapa upaya yang dilakukan *Women's League of Burma (WLB)* meliputi tujuan utama dengan memberdayakan perempuan dengan memberikan mereka pendidikan, pelatihan, dan peluang ekonomi yang telah menjadi langkah penting untuk mencapai kesetaraan gender dan mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan; upaya *Women's League of Burma (WLB)* yang berfokus pada peningkatan kesetaraan gender dengan kepentingan mencapai demokrasi dan pembangunan berkelanjutan.

Kesetaraan gender mencakup pengakuan dan penilaian atas kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap masyarakat dan memastikan bahwa kedua gender mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi,

sosial, dan politik; peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang menjadi hal sangat penting untuk mencapai demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan mereka dipertimbangkan, sehingga menghasilkan hasil yang lebih inklusif dan adil; penanganan kekerasan berbasis gender yang merupakan hambatan besar bagi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Women's League of Burma (WLB) bekerja untuk mencegah dan merespons kekerasan berbasis gender, memastikan bahwa perempuan dilindungi dari kekerasan dan pelecehan; *Women's League of Burma (WLB)* juga tengah mempromosikan hak-hak perempuan, termasuk hak reproduksi, pendidikan, dan kesempatan kerja. Hal ini penting untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan untuk mengendalikan kehidupan mereka dan mengambil keputusan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan hingga menerangkan sebuah fenomena yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi dengan memberikan fakta yang telah melalui proses pemilahan dan fakta yang *general*.³⁴ Penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan secara *detail* bahwa deskriptif yang

³⁴ Hasan, M., & Harahap, T. K. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Hal 220-230

memiliki arti untuk mengeksplorasi suatu rumusan masalah secara luas, menyeluruh dan mendalam.³⁵ Metode penelitian deskriptif digunakan guna menjelaskan bagaimana peran *Women's League of Burma (WLB)* dalam upaya memperjuangkan demokrasi yang ada di Myanmar pada masa pandemic *Covid-19*.

1.6.2 Metode Analisa Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode teknik analisis data kualitatif yang merupakan sebuah penelitian fenomena sosial yang berfokus pada tingkah laku manusia dalam suatu situasi tertentu.³⁶ Peneliti menganalisis data yang menunjukkan kualitas dari sebuah fenomena yang dituangkan melalui kata-kata. Penulis mengumpulkan data-data berupa informasi (data kualitatif) yang mendukung penelitian ini untuk dijadikan data pendukung guna menjelaskan strategi *Women's League of Burma (WLB)* dalam upaya memperjuangkan demokrasi yang ada di Myanmar pada masa pandemic *Covid-19*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan analisis dan interpretasi dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik studi literatur dengan metode membaca, mencatat, mengumpulkan data pustaka dan mengolah bahan penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu melakukan *literature review* yang dijabarkan melalui penelitian terdahulu, membaca dan mencatat

³⁵ Ramdhan, S. Pd., M. M, D. M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara : Surabaya.

³⁶ Hasan, M., & Harahap, T. K. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.

sumber-sumber penting untuk memberikan pemahaman serta inspirasi kepenulisan, hingga melakukan eksekusi dengan melalui pengolahan data yang didapat menjadi tulisan.³⁷

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Agar penelitian ini dapat tersampaikan dengan jelas dan tidak memiliki pembahasan yang melebar serta tidak fokus, maka peneliti memberi batasan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu berfokus pada upaya yang dilakukan oleh *Women's League of Burma (WLB)* dalam memperjuangkan demokrasi di Myanmar pada masa pandemi *Covid-19*. Dihubungkan dengan Teori Kepentingan Kelompok Asosiasional Gabriel A. Almond yang menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana berbagai kelompok kepentingan mengartikulasikan kebutuhan mereka dan mempengaruhi proses politik. Teori ini relevan dan memberikan batasan dalam menganalisis upaya sebuah kelompok kepentingan seperti *Women's League of Burma (WLB)* dalam perjuangan mereka untuk berkembangnya demokrasi di Myanmar. Melalui identifikasi kelompok kepentingan asosiasional membatasi penelitian ini melalui bagaimana *Women's League of Burma (WLB)* menavigasi tantangan kudeta militer dan adanya pandemi *Covid-19*. Analisis ini menyoroti pentingnya kelompok kepentingan dalam usaha mempengaruhi wacana politik dan hasil kebijakan, khususnya dalam rezim yang represif. Penulis juga memberikan batasan pada demokrasi dengan indikator

³⁷ Widiyanti, A. (2020). *Metode Penelitian*. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/34431>

demokrasi dari *National Democracy Institute* yang merupakan kebebasan ekspresi dan bermedia, adanya transparansi dari pemerintah, adanya politik yang bebas dari campur tangan militer dan polisi.³⁸

1.6.4.2 Batasan Waktu

Terdapat batasan penelitian berupa waktu dari terdeteksinya *Covid-19* di Myanmar pada Maret 2020 merupakan waktu awal pandemi dan dalam perjalanannya terjadi hingga pertengahan tahun 2023 yang mana *World Health Organization (WHO)* telah mengumumkan bahwa status kegawatdaruratan global untuk *Covid-19* telah resmi berakhir. Dalam waktu tersebut telah banyak permasalahan yang terjadi di Myanmar, khususnya proses memperjuangkan demokrasi di tengah-tengah pandemi dengan tantangan terjadinya kudeta militer pada tahun 2021.

1.7 Argumen Pokok

Myanmar merupakan salah satu negara yang mengalami berbagai problematika dalam proses menjalankan sistem demokrasi. *Women's League of Burma (WLB)* melalui sudut pandang sebuah kelompok kepentingan yang ada di Myanmar dengan tujuan untuk memperjuangkan demokrasi yang ada di Myanmar dan hak-hak perempuan yang dihadapkan situasi semakin sulit karena adanya pandemi *Covid-19* bersamaan dengan kudeta militer. Dalam pembahasan ini

³⁸ Institute, N. D. (2024). *OUR VISION, MISSION & VALUES*. National Democratic Institute. Retrieved October 18, 2024, from <https://www.ndi.org/mission>

Women's League of Burma (WLB) memiliki peran penting dalam usaha Myanmar menjadi Negara yang demokratis. Melalui *interest group theory* yang dipopulerkan oleh Gabriel A. Almond, *Women's League of Burma (WLB)* di Myanmar ini berjalan menjadi penengah, penginisiasi dan juga fasilitator dalam perjuangan demokrasi Myanmar. Terkhusus pada waktu pandemi *Covid-19* yang menyebabkan adanya banyak perubahan dan permasalahan yang terjadi di Myanmar sehingga dinilai dapat berpengaruh dalam pergerakan yang dilakukan.

Dalam upayanya untuk memperjuangkan demokrasi yang memberikan kebebasan berekspresi dan menggunakan media, adanya transparansi dari pemerintah, serta adanya politik yang bebas dari campur tangan militer dan polisi *Women's League of Burma (WLB)* selama pandemi *Covid-19* berupaya melalui advokasi berkelanjutan untuk demokrasi, peningkatan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dengan peralihan kegiatan yang diselenggarakan secara virtual karena adanya pembatasan sosial, penanganan kekerasan berbasis gender, kolaborasi internasional, dan pemberdayaan masyarakat. Tindakan-tindakan ini mencerminkan komitmen *Women's League of Burma (WLB)* untuk memajukan status perempuan menuju persatuan demokrasi federal Burma yang damai, adil, dan berlandaskan hukum.

Menghubungkan antara teori kelompok kepentingan oleh Gabriel A. Almond didukung dengan teori pemberdayaan perempuan oleh Jimmy Bayes mengarahkan untuk melihat *Women's League of Burma (WLB)* sebagai kelompok kepentingan institusional yang terorganisir dengan baik dan berusaha untuk memperjuangkan hak-hak perempuan serta mendukung perkembangan demokrasi

yang ada di Myanmar khususnya pada masa pandemi *Covid-19*. Kelompok kepentingan melihat bahwa *Women's League of Burma (WLB)* memiliki peran penting dalam sistem politik sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, yang mana dapat berfungsi sebagai katalisator dalam proses politik yang ada di Myanmar sebagaimana tujuan *Women's League of Burma (WLB)* berfokus pada advokasi hak-hak perempuan serta demokrasi.

Penggunaan teori pemberdayaan perempuan oleh Jimmy Bayes yang mana teori ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik tetapi juga mencakup penguatan posisi dan suara mereka dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan *Women's League of Burma (WLB)* yang berusaha untuk memberdayakan perempuan di Myanmar agar lebih terlibat dalam proses demokrasi. Dengan menggabungkan kedua teori tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait dinamika politik di Myanmar dan upaya yang dijalankan oleh *Women's League of Burma (WLB)* dalam memperjuangkan demokrasi dan hak-hak perempuan selama masa krisis di Myanmar.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri atas empat bab dengan sub-bab yang membahas secara khusus sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Sistematika Penelitian

BAB I	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
--------------	---

	<p>1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p>1.3.2 Manfaat Penelitian</p> <p>1.3.2.1 Manfaat Akademis</p> <p>1.3.2.2 Manfaat Praktis</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Kerangka Konseptual</p> <p>1.5.1 Konsep <i>Group Interest</i></p> <p>1.5.2 Konsep Pemberdayaan Perempuan</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p>1.6.1 Tipe Penelitian</p> <p>1.6.2 Metode Analisa Data</p> <p>1.6.3 Teknik Pengumpulan Data</p> <p>1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>1.6.4.1 Batasan Materi</p> <p>1.6.4.2 Batasan Waktu</p> <p>1.7 Argumen Pokok</p> <p>1.8 Sistematika Penulisan</p> <p>1.9 Daftar Pustaka</p>
BAB II	<p><i>WOMEN'S LEAGUE OF BURMA DAN PERJUANGAN DEMOKRASI DI MYANMAR</i></p> <p>2.1 Sejarah <i>Women's League of Burma (WLB)</i></p> <p>2.1.1 <i>Women's League of Burma (WLB)</i> pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i></p> <p>2.2 Situasi Politik dan Dinamika Demokrasi di Myanmar</p> <p>2.2.1 Demokrasi di Myanmar sebelum Pandemi <i>Covid-19</i></p> <p>2.2.2 Demokrasi di Myanmar pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i></p> <p>2.3 Kelompok Kepentingan Pro Demokrasi di Myanmar</p>
BAB III	<p><i>ANALISIS WOMEN'S LEAGUE OF BURMA DALAM MEMPERJUANGKAN DEMOKRASI DI MYANMAR PADA MASA PANDEMI COVID-19</i></p> <p>3.1 <i>Women's League of Burma (WLB)</i> sebagai Kelompok Kepentingan yang Berdaya dalam Mewujudkan Demokrasi di Masa Pandemi <i>Covid-19</i></p> <p>3.2 Strategi <i>Women's League of Burma (WLB)</i> dalam Memperjuangkan Demokrasi di Tengah Pandemi <i>Covid-19</i></p> <p>3.3 Tantangan yang Dihadapi <i>Women's League of Burma (WLB)</i> dalam Memperjuangkan Demokrasi Myanmar pada Pandemi <i>Covid-19</i></p>

BAB IV	PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA	

